



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

ꦝꦶꦏꦏꦏꦠꦶꦗꦶꦗꦏꦠꦏꦺꦴꦗꦴꦗꦏꦠꦏꦺꦴꦗꦴꦗꦏꦠ

ꦗꦶ. ꦏꦺꦤꦶꦫꦶ. ꦠꦺ. 56 ꦗꦺꦴꦗꦴꦗꦏꦠꦏꦺꦴꦗꦴꦗꦏꦠ ꦏꦺꦴꦱ ꦱꦺ: 55165 ꦠꦺꦑ. (0274) 515865, 562682

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: [dp3ap2kb@jogjakota.go.id](mailto:dp3ap2kb@jogjakota.go.id)

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)

WEBSITE: [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK  
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA  
YOGYAKARTA**

**NOMOR : 0741/KPTS/DP3AP2KB/III / 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA KERJA TIM REFORMASI BIROKRASI PADA DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA**

**TAHUN 2021 - 2022**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA**

- Menimbang** :
- a bahwa dalam rangka mendukung implementasi program kegiatan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta, perlu menetapkan Rencana Kerja Tim Reformasi Birokrasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;
  - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Rencana Kerja Tim Reformasi Birokrasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta Tahun 2021-2022;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
  - 3. Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
8. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 502 Tahun 2017 tentang Penetapan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 di Pemerintah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTATAHUN 2021 - 2022.
- KESATU : Membentuk Rencana Kerja Tim Reformasi Birokrasi pada Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Rencana Kerja Tim Reformasi Birokrasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta Tahun 2021 - 2022 dengan susunan rencana kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta Tahun 2021 - 2022 ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA

: Keputusan Kepala Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 2 Maret 2021

  
Ir. Edy Muhammad  
NIP. 19630916 199203 1 006



**SEGORO AMARTO**

Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta  
Kemandirian – Kedisiplinan – Kepedulian – Kebersamaan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA KOTA YOGYAKARTA  
 Nomor 074/KPTS/DP3AP2KB/III/2021  
 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA TIM REFORMASI BIROKRASI PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021-2022

RENCANA KERJA TIM REFORMASI BIROKRASI PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021-2022

Area Perubahan	Rencana Kerja	Hasil Yang Diharapkan	2021				2022				
			Tahapan/ TW				Tahapan/ TW				
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1. Manajemen Perubahan	a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	1) Penetapan SK Tim Reformasi Birokrasi DP3AP2KB , meliputi susunan personalia dan uraian tugas; 2) dukungan pegawai terhadap program/ kegiatan perubahan Reformasi Birokrasi pada DP3AP2KB; 3) keberhasilan pelaksanaan manajemen perubahan pada DP3AP2KB, 4) perbaikan berkelanjutan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada DP3AP2KB .	v				v				
	b. Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi melalui pelaksanaan rencana aksi budaya satriya dan rencana tindak agen perubahan	1) Data dukungan dan menurunnya resistensi terhadap perubahan Reformasi Birokrasi pada DP3AP2KB 2) pedoman/rencana kerja perubahan Reformasi birokrasi pada DP3AP2KB; 3) implementasi perubahan Reformasi Birokrasi area manajemen perubahan sesuai dengan peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan "SATRIYA" pada DP3AP2KB di Pemkot Yogyakarta dan rencana tindak agen perubahan 4) semakin konsistennya keterlibatan pimpinan dan seluruh jajaran pegawai	v				v				

Area Perubahan	Rencana Kerja	Hasil Yang Diharapkan	2021				2022			
	c. Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam Rangka Reformasi Birokrasi	1) Penyelenggaraan sosialisasi/internalisasi manajemen perubahan (rapat internal/apel/sosialisasi/koordinasi) pada DP3AP2KB;	v	v			v	v		
		2) semakin meningkat perubahan mindset, culture set dan komitmen terhadap manajemen perubahan yang dinamis terhadap perkembangan zaman pada DP3AP2KB;								
		3) manajemen perubahan merubah sistem dan mekanisme kerja organisasi yang pada DP3AP2KB;								
		4) internalisasi nilai-nilai "SATRIYA", Kode Etik, Aturan Perilaku, pakta integritas dan rencana tindak Agen of Change pada seluruh pegawai Bagian Organisasi Pemkot Yogyakarta.								
	d. Evaluasi Penerapan Kebijakan Agen Perubahan	1) Penerapan kebijakan agen of change pada DP3AP2KB sesuai dengan Rencana Tindak agen of change;	v	v	v	v	v	v	v	v
		2) agen perubahan memberikan dampak perubahan pada DP3AP2KB .								
e. Pengukuran Dampak Perubahan	Data capaian tentang dampak perubahan dan laporan progres RB pada DP3AP2KB .			v				v		
f. Monitoring dan Evaluasi Dampak Perubahan	1) Budaya Satriya semakin melekat pada setiap pegawai				v				v	
	2) rekomendasi perbaikan/ tindak lanjut terhadap hambatan implementasi manajemen perubahan pada DP3AP2KB									
2. Deregulasi Kebijakan/ Penataan Perundang-undangan	a. Memfasilitasi regulasi perizinan sesuai dengan ketentuan pusat	Sinkronisasi regulasi perizinan sesuai dengan ketentuan pusat	v	v	v	v	v	v	v	
	b. menyusun produk hukum bidang ketetalaksanaan, pelayanan publik, reformasi birokrasi, kelembagaan dan anjab harmonis dengan ketentuan	produk hukum bidang ketetalaksanaan, pelayanan publik, reformasi birokrasi, kelembagaan dan anjab harmonis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	v	v	v	v	v	v	v	





Area Perubahan	Rencana Kerja	Hasil Yang Diharapkan	2021				2022			
	d. Pengelolaan Website DP3AP2KB	keterbukaan informasi publik	v	v	v	v	v	v	v	v
8. Penguatan Pengawasan	a. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Bagian Organisasi	1) menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang 2) meningkatnya sistem integritas dalam upaya pencegahan tindak KKN 3) meningkatnya kepatuhan dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan	v				v			
	b. Implementasi penanganan benturan kepentingan		v				v			
	c. Penerapan Whistle Blowing System pada DP3AP2KB		v				v			
	d. Penyampaian 100% LHKPN		v				v			
	e. Penyampaian 100% LHKASN									
9.Quick WIN	pemanfaatan TI	1) efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	v	v	v	v	v	v	v	v
	penerapan Inovasi	2) Percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	v	v	v	v	v	v	v	v

